

How the Newspaper Became a Medium of Social Criticism in Indonesia 1966–1974

Iksan Rubeno^{a*}, Mukhamad Shokheh

^aUniversitas Negeri Semarang, Semarang, Indonesia

* rubenoiksan@students.unnes.ac.id

Abstract

In 1966, Suharto replaced Sukarno as the second President of the Republic of Indonesia. During his leadership, newspapers that had previously been banned under Sukarno's administration were allowed to resume publication. This study aims to describe the role of newspapers as a medium of social criticism during the early phase of the New Order's political consolidation, leading up to the events of January 15, 1974. The research employs a historical method. It explores the transition from Guided Democracy to the New Order, the process of the regime's consolidation, the role of newspapers as a channel of social criticism between 1966 and 1974, and the New Order government's responses to criticisms raised by various press institutions. The study finds that although newspapers had some space to express criticism of the government during that period, the New Order regime imposed increasingly strict control over the press as authoritarianism strengthened.

Keywords: Newspapers, Social Criticism, Old Order and New Order

Surat Kabar sebagai Media Kritik Sosial di Indonesia 1966-1974

Abstrak

Pada tahun 1966, Soeharto naik menggantikan Soekarno sebagai presiden kedua Republik Indonesia. Pada masa kepemimpinannya, surat kabar-surat kabar yang sebelumnya dilarang terbit pada masa kepemimpinan Soekarno, kembali diperbolehkan terbit. Penelitian ini bertujuan untuk memaparkan peranan surat kabar sebagai media kritik sosial pada masa awal konsolidasi politik Orde Baru hingga Peristiwa 15 Januari 1974. Metode yang digunakan dalam penelitian adalah metode historis. Penelitian ini membahas proses transisi dari Demokrasi Terpimpin ke Orde Baru, proses konsolidasi Orde Baru, peran surat kabar sebagai media kritik sosial antara 1966-74, dan respon pemerintah Orde Baru terhadap kritikan-kritikan yang dilontarkan oleh berbagai badan pers. Penelitian ini menunjukkan bahwa walau surat kabar di masa itu memiliki ruang untuk menyuarakan kritik kepada pemerintah, pemerintah Orde Baru tetap memberlakukan kontrol yang ketat kepada surat kabar seiring menguatnya otoritarianisme.

Kata Kunci: Surat Kabar, Kritik Sosial, Orde Lama dan Orde Baru

Pendahuluan

Media massa adalah sarana komunikasi yang menyampaikan informasi kepada publik secara luas, baik melalui media cetak seperti surat kabar maupun media elektronik. Menurut (McQuail, 2020), media massa mampu dijadikan sebagai saluran penyampaian pesan-pesan publik dan advokasi terhadap isu-isu sosial yang tengah berkembang di masyarakat. Dari berbagai bentuk media massa yang ada, media massa yang paling tua adalah surat kabar yang masih populer hingga saat ini, terutama karena kemampuannya dalam menyampaikan informasi secara mendalam serta menyuarakan kritik terhadap berbagai isu, seperti isu sosial-politik.

Surat kabar juga dipandang sebagai alat untuk mengkritisi kebijakan pemerintah. Bagi para insan pers, kritik sosial merupakan salah satu cara menjalankan fungsi pers pada umumnya, yaitu pers sebagai alat kontrol sosial. Pers-pers yang kerap melontarkan kritik sosial ini, perlu menyalurkan kritikannya ala kadarnya sehingga tidak terjadi kerusuhan akibat berita yang diterbitkan dan mengandung unsur-unsur kritik sosial dibumbui dengan sentimen-sentimen tertentu. (Akbar, 1997) Biasanya, surat kabar tersebut menyuarakan kritik mereka kepada pemerintah melalui simbol-simbol seperti karikatur maupun pesan yang berbentuk teks, seperti tajuk wacana.

Setelah Soekarno tumbang, kebebasan pers lahir kembali dengan adanya UU Pokok Pers yang mulai berlaku pada tahun 1966. Pada masa itu, beberapa badan pers yang dibredel rezim Orde Lama mulai diizinkan kembali untuk terbit. Di samping itu, beberapa badan pers baru mulai bermunculan, seperti Kompas yang didirikan oleh PK Ojong dan Jacob Oetama. Adapun badan pers yang dikelola oleh mahasiswa (pers mahasiswa) mulai menerbitkan surat kabarnya sendiri, seperti *Harian KAMI* dan *Mahasiswa Indonesia* (Hill, 2011, hal. 36).

Surat kabar tersebut memuat kritikan kepada pemerintah, seperti kritik kasus korupsi dan kebobrokan ekonomi yang terjadi di masa Demokrasi Terpimpin. Tidak hanya itu, surat kabar tersebut juga mengkritisi kebobrokan pada masa awal Orde Baru seperti dugaan pemberoran yang dilakukan oleh Jenderal Ibnu Sutowo, direktur Pertamina pada awal Orde Baru hingga kritik atas pembentukan asisten pribadi (Aspri) Soeharto yang mayoritas diisi oleh perwira-perwira kepercayaan Soeharto. Namun pada akhirnya, pembredelan kembali terjadi setelah Malari (Malapetaka 15 Januari) 1974, yang membuat pers politik kehilangan momentumnya.

Penelitian ini relevan dengan kondisi saat ini, apalagi ada beberapa aspek yang cukup menarik dalam surat kabar oposisi dari berbagai kalangan, seperti surat kabar milik mahasiswa dan surat kabar oposisi yang berskala nasional, seperti aspek kritisisme yang muncul dari dalam surat kabar tersebut, melalui karikatur hingga tajuk wacana yang memiliki makna kritik sosial yang tersirat.

Dalam melakukan penelitian ini, peneliti menggunakan berbagai macam sumber pustaka. Buku referensi yang menjadi landasan dalam penelitian ini, yaitu MC. Ricklefs yang berjudul *Sejarah Indonesia Modern 1200-2008*. Dalam buku ini, berbagai peristiwa penting dalam sejarah Indonesia dibahas secara gamblang dan tuntas dari berbagai aspek. Buku ini juga membahas peralihan rezim dari Orde Lama ke Orde Baru, termasuk pengembalian kebebasan pers yang kemudian memberikan kesempatan bagi para insan pers untuk mengkritisi pemerintah karena melakukan penyelewengan kekuasaan maupun korupsi, hingga

kerusuhan Malari 1974 yang mengakhiri kebebasan pers tersebut. Sayangnya, buku ini tidak memaparkan peranan surat kabar oposisi sebagai *watchdog* pemerintah Orde Baru.

Buku lainnya yang digunakan dalam penelitian ini adalah buku karya Abdurrachman Surjomihardjo yang berjudul *Beberapa Segi Sejarah Perkembangan Pers di Indonesia*. Buku ini memaparkan perkembangan media cetak yang ada di Indonesia, mulai dari penerbitan Bataviasche Nouvelles yang terbit pada tahun 1744, sebagai pelopor penerbitan media massa berbasis cetak pertama di Indonesia hingga penutupan surat kabar oposisi yang menentang rezim Orde Baru, baik pers-pers yang dikelola oleh mahasiswa maupun para wartawan senior. Buku ini memang memaparkan sejarah pers Indonesia dari masa ke masa, akan tetapi buku ini tidak menjelaskan bagaimana makna dari berbagai simbol-simbol yang terkandung dalam sebuah karikatur maupun tajuk wacana yang menjadi alat kritik kepada pemerintah.

Buku-buku pendukung yang berkaitan dengan peralihan rezim Orde Lama ke Orde Baru, yaitu buku Harold Crouch yang berjudul *Militer dan Politik di Indonesia*, atau dalam Bahasa Inggrisnya disebut dengan nama *The Army and Politics in Indonesia*. Buku ini lebih dalam ketika membahas tentang peranan militer Indonesia dalam kehidupan politik, mulai dari masa setelah kemerdekaan hingga Orde Baru. Dalam buku ini juga dibahas bagaimana gerakan-gerakan mahasiswa seperti Kesatuan Aksi Mahasiswa Indonesia (KAMI) membantu militer untuk membangun Orde Baru, dengan berbagai bantuan organisasi mahasiswa yang tergabung ke dalam KAMI. Walau demikian, buku ini hanya fokus kepada peranan TNI dalam membantu gerakan-gerakan mahasiswa, tanpa disebutkan peranan pers mahasiswa maupun oposisi nasional dalam peristiwa tersebut.

Buku karya Soe Hok Gie yang berjudul *Catatan Seorang Demonstran* juga dapat dijadikan sebagai acuan dalam penelitian ini. Buku ini mengisahkan tentang biografi politik Soe Hok Gie, yaitu seorang aktivis penentang rezim Demokrasi Terpimpin. Mulai dari kehidupan awalnya, masa perkuliahan di Fakultas Sastra UI, hingga menghembuskan napas terakhirnya ketika mendaki Gunung Semeru pada tahun 1968. Buku ini juga menjelaskan kondisi politik Indonesia pada masa itu hingga kejadian-kejadian demonstrasi yang dilakukan oleh para mahasiswa, akan tetapi, pembahasan buku ini dalam lingkup temporalnya berhenti pada tahun 1968, bertepatan dengan wafatnya Soe Hok Gie. Dalam lingkup spasialnya, buku ini hanya menyoroti wilayah Jakarta sebagai episentrum pergerakan mahasiswa pada saat itu. Karena buku ini merupakan buku biografi perjalanan politik Gie, maka surat kabar oposisi yang disebutkan tidak terlalu dibahas sepak terjangnya dan bagaimana surat kabar yang ada pada saat itu menjadi media kritik kepada pemerintah.

Buku David T. Hill yang berjudul *Pers di Masa Orde Baru* juga menjadi buku pendukung dalam proses penelitian ini. Buku ini menjelaskan kondisi surat kabar di masa Orde Baru. Buku ini memaparkan dinamika kehidupan para badan pers di era Orde Baru, mulai dari menjamurnya badan-badan pers hingga peristiwa pembredelan terhadap pers-pers yang dinilai ‘membangkang’ terhadap rezim Orde Baru. Meskipun demikian, buku ini hanya memaparkan intisari dari berbagai badan pers berikut sepak terjangnya, tanpa merincikan peran surat kabar oposisi sebagai alat pengawas (*watchdog*) pemerintah Orde Baru, atau dengan kata lain, sebagai media yang menyampaikan kritik kepada pemerintah Orde Baru. Buku ini juga tidak merincikan bagaimana surat kabar yang ada pada saat itu mengkritisi pemerintah, baik melalui karikatur dengan gambar-gambar yang mewakili tokoh atau peristiwa tertentu (personifikasi), laporan-laporan jurnalistik, maupun tajuk wacana. Buku tersebut juga sangat minim pembahasan tentang

isu-isu hangat yang menjadi topik kritisisme kepada rezim Orde Baru. Selain itu, secara aspek temporal, buku ini mengakhiri pembahasan pada tahun 1998, ketika Orde Baru runtuh.

Buku pendukung selanjutnya adalah buku Francois Raillon yang berjudul *Politik dan Ideologi Mahasiswa Indonesia 1966-1974*. Buku ini secara gamblang memaparkan perkembangan surat kabar milik mahasiswa yang berlokasi di Bandung, yaitu Mahasiswa Indonesia. Surat kabar ini sangat rajin mengkritisi gaya hidup mewah dari para pejabatnya melalui berbagai macam karikatur, tajuk wacana, maupun laporan-laporan jurnalistik yang dibuat oleh para wartawan maupun kontributornya, termasuk Rosihan Anwar. Buku ini juga menyebut adanya splinter dari surat kabar Mahasiswa Indonesia, yaitu Mimbar Demokrasi, yang didirikan karena tendensi surat kabar Mahasiswa Indonesia yang cenderung anti terhadap kaum Islamis dan tidak menyerap aspirasi umat Islam setiap publikasinya.

Adapun buku *Pers Mahasiswa Indonesia: Patah Tumbuh Hilang Berganti* karya AE Siregar, buku ini lebih dominan membahas tentang sepak terjang pers mahasiswa maupun yang berafiliasi dengan lembaga kemahasiswaan tertentu, yaitu surat kabar Mahasiswa Indonesia, Harian KAMI, hingga Mimbar Demokrasi, maupun pers mahasiswa lainnya. Perbandingan-perbandingan antara ketiga surat kabar ini, berikut perjalanan sejarah pers mahasiswa, dibahas dengan gamblang. Adapun kekurangan yang muncul dalam buku ini adalah hanya membahas analisis perbandingan isi surat kabar, sepak terjang surat kabar yang ada, hingga pola yang dimiliki dalam perputaran pers mahasiswa dari era Demokrasi Terpimpin yang kental dengan suasana otoritarianisme, kemudian bergerak ke arah pers bebas (libertarian) antara tahun 1966 hingga 1974, hingga kembali lagi ke arah otoritarianisme sejak 1974 hingga akhir rezim Orde Baru.

Untuk menganalisis hubungan antara pemerintah, mahasiswa, dan kelompok-kelompok politik lainnya, peneliti menggunakan buku karya Mukhammad Shokheh yang berjudul *Dari Konfrontasi menuju Akomodasi: Relasi Islam-Negara di Indonesia masa Orde Baru 1966-1998*. Buku ini membahas tentang kondisi politik Indonesia di masa peralihan kekuasaan dari Orde Lama ke Orde Baru, bagaimana Orde Baru dapat berdiri, pendekatan-pendekatan yang dilakukan pemerintah Orde Baru terhadap para kelompok Islam, mulai dari pendekatan yang bersifat konfrontatif, yang ditandai dengan kecurigaan pemerintah Orde Baru terhadap para kelompok Islam. Buku ini sangat minim pembahasan tentang peranan pers oposisi sebagai media kritik kepada pemerintah Orde Baru, walaupun membahas tentang transisi kekuasaan dari rezim Orde Lama ke Orde Baru dan peristiwa kerusuhan 15 Januari 1974.

Buku yang juga membahas tentang peristiwa Malari yaitu *Hariman dan Malari: Gelombang Aksi Mahasiswa melawan Modal Asing*, membahas tentang sepak terjang Hariman Siregar ketika berkuliahan di Universitas Indonesia, dinamika politik ketika peralihan rezim Orde Lama ke Orde Baru, kondisi kebebasan pers, dan sebagian kecil aspek kritisisme yang terdapat dalam sebuah surat kabar yang beredar saat itu, serta bagaimana hubungan antara mahasiswa dengan pemerintah Orde Baru. Meskipun membahas berbagai macam aspek kritisisme dalam surat kabar yang beredar saat itu, terutama sebelum kerusuhan Malari (Malapetaka 15 Januari 1974) meletus, namun tidak terlalu banyak dipaparkan dalam buku ini, mengingat buku ini hanya berfokus pada biografi politik Hariman Siregar, salah satu motor penggerak dari gerakan protes menentang modal asing Jepang, dugaan pemborosan dengan adanya rencana pembangunan Miniatur Indonesia Indah yang kemudian menjadi Taman Mini Indonesia Indah, hingga dugaan penyelewengan di Pertamina, yang melibatkan Ibnu Sutowo.

Artikel jurnal yang digunakan sebagai pendukung dalam penelitian ini adalah artikel jurnal karya Andi Suwirta yang berjudul *Pers dan Kritik Sosial pada masa Orde Baru: Studi Kasus Pers Mingguan Mahasiswa Indonesia di Bandung 1966-1974*, membahas tentang sepak terjang surat kabar Mahasiswa Indonesia dari ketika berdiri pada tahun 1966 ketika pergantian rezim Orde Lama ke Orde Baru hingga dibredel sepenuhnya pada tahun 1974, karena dianggap terlalu tajam dalam mengkritisi pemerintah Orde Baru. Artikel jurnal ini juga membahas berbagai macam isu yang menjadi perhatian redaksi Mahasiswa Indonesia, yang terbit mingguan ini. Meski demikian, artikel jurnal ini hanya mengkaji salah satu surat kabar oposisi yang beredar di masa itu, yaitu surat kabar Mahasiswa Indonesia. Secara aspek spasial, peneliti hanya berkutat pada sebuah surat kabar mahasiswa di Bandung.

Berdasarkan sumber-sumber pustaka yang dihimpun, peneliti menyimpulkan bahwa berbagai sumber pustaka tersebut mengkaji berbagai hal, mulai dari peralihan kekuasaan dari Demokrasi Terpimpin ke Orde Baru dan peran militer dan mahasiswa di dalamnya hingga kebijakan pembredelan yang dilakukan pemerintah Orde Baru secara sporadis setelah kerusuhan 15 Januari 1974. Meski demikian, terdapat sebuah kekosongan penelitian yaitu bentuk-bentuk kritik yang digunakan oleh pers oposisi nasional dan mahasiswa berikut maknanya, yang belum dibahas dalam berbagai sumber pustaka tersebut. Rata-rata sumber pustaka tersebut hanya membahas dalam kacamata historis-politik tanpa membahas peranan dan bentuk-bentuk kritik yang digunakan berikut maknanya. Oleh karena itu, penelitian ini akan berkontribusi dengan melakukan analisis wacana, visual, dan simbolis dalam berbagai pers oposisi, melalui pendekatan analisis wacana kritis dan semiotika untuk memahami bagaimana peran pers oposisi menjadi ‘senjata’ kritisisme yang paling ampuh bagi pemerintah berikut bentuk yang digunakan.

Dengan adanya studi literatur dan latar belakang penelitian yang tertera dalam bagian ini, maka peneliti dapat merumuskan berbagai macam permasalahan yang akan dikaji dalam penelitian ini. Permasalahan-permasalahan yang akan dikaji dalam penelitian ini berupa: (1) bagaimana transisi kekuasaan dari rezim Orde Lama ke Orde Baru dan proses pemulihian kebebasan pers yang ditandai dengan munculnya berbagai macam pers oposisi; (2) bagaimana pers oposisi mampu menjadi media kritik sosial di masa Orde Baru, tepatnya antara tahun 1966 hingga 1974; (3) apa saja bentuk kritik yang digunakan oleh berbagai pers oposisi antara tahun 1966 hingga 1974; dan (4) bagaimana reaksi dari rezim Orde Baru dengan menjamurnya pers oposisi yang menjadi media kritik pemerintah, hingga kemudian diberangus setelah peristiwa 15 Januari 1974.

Metode

Penelitian ini menggunakan pendekatan historis. Dalam melakukan penelitian ini, dalam proses penelitian sejarah, ada beberapa tahapan yang dilalui seperti heuristik atau pengumpulan sumber data, kritik, interpretasi atau analisis data, dan historiografi. (Gottschalk, 1986).

Heuristik sendiri adalah proses pengumpulan sumber data sejarah, baik berupa sumber primer maupun sekunder. Sumber data sejarah yang digunakan terdiri atas dokumen tertulis, artefak, dan sumber lisan. Sumber data tersebut kemudian diklasifikasikan berdasarkan rentang waktunya, seperti sumber primer dan sekunder. Sumber primer sendiri merupakan sumber data yang sezaman dengan rentang waktu penelitian sejarah yang digunakan, baik itu sumber tertulis, lisan, maupun benda. Adapun sumber sekunder

sendiri merujuk kepada sumber-sumber data yang tidak sezaman dengan rentang waktu penelitiannya. (Kuntowijoyo, 1995).

Setelah sumber data terkumpul, baik berupa sumber lisan, benda, maupun dokumen tertulis, tahapan selanjutnya adalah verifikasi atau kritik sumber. Kritik sumber data dalam proses penelitian sejarah terbagi menjadi dua, yaitu kritik intern yaitu validasi sumber data dengan membandingkan sumber data yang didapatkan dan kritik ekstern yang mengdepankan verifikasi fisik sumber data.

Setelah sumber-sumber data diverifikasi, tahap selanjutnya adalah melakukan interpretasi terhadap sumber-sumber data yang didapatkan, yang kemudian dilanjutkan dengan historiografi atau penulisan sejarah. Interpretasi dilakukan dengan cara melakukan penafsiran terhadap salah satu sumber data yang didapatkan, seperti sumber lisan, dokumen tertulis, dan artefak. Interpretasi ini menggunakan sudut pandang tertentu, seperti sejarah politik, kebudayaan, sosial, maupun ekonomi. Interpretasi dan historiografi sendiri meliputi tahap deskripsi, narasi, dan analisis. (Sjamsuddin, 2007, hal. 123) Bedanya, dalam interpretasi, peneliti hanya menafsirkan sumber-sumber melalui sudut pandang tertentu, tergantung penelitian yang dilakukan. Sementara, tahap historiografi lebih menitikberatkan kepada penulisan ulang sejarah berdasarkan fakta-fakta sejarah yang telah terkumpul dan diperiksa kredibilitasnya.

Dalam melakukan proses penelitian, peneliti menggunakan berbagai fasilitas untuk melakukan proses heuristik atau pengumpulan data. Peneliti menggunakan fasilitas Perpustakaan Nasional Republik Indonesia, baik yang terletak di Medan Merdeka Selatan maupun Salemba untuk mengakses surat kabar dan sumber pustaka yang menjadi objek kajian tersebut, seperti surat kabar *Indonesia Raya*, *Harian KAMI*, *Mahasiswa Indonesia*, dan *Mimbar Demokrasi*. Peneliti juga menggunakan fasilitas KHASTARA yang dikembangkan oleh pihak Perpustakaan Nasional Republik Indonesia, yaitu fasilitas pencarian naskah kuno, surat kabar langka, majalah, dan lain-lain yang sudah dilakukan digitalisasi oleh pihak perpustakaan. Untuk mendapatkan sumber pustaka pendukung, peneliti menggunakan berbagai fasilitas perpustakaan, seperti Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah, Perpustakaan Jurusan Sejarah FISIP Universitas Negeri Semarang, Perpustakaan Universitas Diponegoro, dan lain-lain.

Hasil dan Pembahasan

Transisi Kekuasaan dari Rezim Orde Lama ke Orde Baru dan Pemulihan Kebebasan Pers

Imbas dari percobaan kudeta pada tanggal 30 September 1965, kepercayaan masyarakat terhadap Soekarno mulai menurun. Hal ini ditandai dengan adanya demonstrasi mahasiswa secara sporadis yang terjadi pada tanggal 7 Januari 1966, yang di mana, para mahasiswa dari berbagai universitas di Jakarta mulai turun ke jalan untuk menekan Bung Karno dan jajaran-jajaran kabinetnya untuk menurunkan harga-harga bahan pokok, termasuk tiket bus kota yang ikut naik sebagai imbas dari naiknya harga BBM. Pada tanggal 10 Januari 1966, mahasiswa kembali melakukan long march ke Sekretariat Negara setelah berorasi dengan orasi-orasi anti-PKI dan G30S, yang dilanjutkan dengan menyampaikan tuntutan-tuntutan mereka ke Chaerul Saleh, yang dianggap sebagai 'biang kerok' dari kenaikan harga bahan-bahan pokok. Ketika Soekarno menyelenggarakan sidang paripurna kabinet di Istana Bogor pada tanggal 15 Januari 1966, para mahasiswa dari berbagai universitas di Jakarta, termasuk Universitas Indonesia, melakukan unjuk rasa

besar-besaran dengan tuntutan-tuntutan yang sama, yaitu pembubaran Partai Komunis Indonesia; retool Kabinet Dwikora yang sebagianya diisi oleh menteri-menteri yang berpihak kepada PKI atau Gerakan 30 September itu sendiri, seperti Soebandrio, yang kala itu menjabat sebagai menteri luar negeri; dan penurunan harga bahan-bahan pokok. Ketiga tuntutan tersebut dikenal pula sebagai 'Tiga Tuntutan Rakyat' atau Tritura (Soe, 1989).

Puncak dari ketegangan politik yang berujung pada hilangnya popularitas Soekarno di mata rakyat terjadi pada tanggal 11 Maret 1966, yang di mana, Soekarno melimpahkan seluruh urusan keamanan dalam negeri kepada Pangkostrad saat itu, yaitu Soeharto. Surat perintah ini diperkuat oleh MPRS menjadi sebuah Ketetapan MPRS no. 9 tahun 1966, pada tanggal 21 Juni 1966, sehingga Supersemar memiliki landasan legal formal bagi Soeharto untuk 'memulihkan keamanan dan ketertiban dalam negeri', yang berujung pada pembubaran PKI di seluruh wilayah Indonesia, yang diperkuat dengan Ketetapan MPRS no. 25 tahun 1966 yang ditetapkan pada tanggal 5 Juli 1966. Dalam ketetapan tersebut, Partai Komunis Indonesia dilarang untuk menjalankan aktivitasnya di seluruh wilayah Indonesia karena ideologi partai (Marxisme-Leninisme atau sejenisnya) dianggap bertentangan dengan Pancasila (Samsudin, 2004).

Pada tanggal 22 Juni 1966, Soekarno membacakan pidato pertanggungjawabannya dalam Sidang Umum MPRS dengan nama 'Nawaksara', dengan memaparkan 10 poin pertanggungjawaban di sidang tersebut. Namun, dalam pidatonya itu, Soekarno tidak menyebutkan peristiwa kudeta yang dilakukan oleh kelompok yang menamakan dirinya 'Gerakan 30 September'. Alhasil, pidato pertanggungjawabannya ditolak oleh MPRS. Hal tersebut menjadikan sebuah batu loncatan bagi Soeharto untuk naik ke tumpuk kekuasaan secara efektif, sekaligus mengawali periode Orde Baru (Ricklefs, 2008).

Dalam menyusun sebuah konsepsi yang kelak dijadikan sebagai pedoman dan arah dari Orde Baru, sebagai pembeda dari Orde Lama atau nama lain dari rezim Soekarno, AH. Nasution mendefinisikan Orde Baru sebagai sebuah era baru yang menekankan prinsip stabilitas nasional yang diiringi dengan konsolidasi ekonomi dan sosial di dalam negeri, sekaligus mewujudkan demokrasi politik dan ekonomi secara konsisten. Konsepsi tersebut dipertegas dengan berbagai roadmap untuk mewujudkan stabilitas politik dan demokrasi ekonomi-politik yang baik, seperti penguatan hubungan sipil-militer, pemberantasan korupsi, pembinaan gerakan mahasiswa, dan lain-lain (Nasution, 1967).

Sebagai sebuah tindak lanjut dari penguatan *soko guru* Orde Baru, pemulihan kebebasan pers merupakan salah satu prioritas utama. Untuk memulihkan kebebasan pers, pemerintah mengesahkan UU Pokok Pers pada tahun 1966. Dalam UU ini, terdapat berbagai aspek yang diatur dalam peraturan tersebut, seperti pengertian pers nasional secara umum, aspek-aspek yang terdapat dalam pers nasional, fungsi pers nasional, dan lain-lain. Setelah disahkannya UU no. 11 tahun 1966 tentang Pokok-Pokok Pers Nasional, beberapa surat kabar oposisi yang sebelumnya dibredel, seperti *Indonesia Raya*, *Pedoman*, *Abadi*, dan lain-lain, diizinkan kembali untuk terbit dua tahun kemudian. Tidak hanya itu, beberapa surat kabar oposisi yang baru, seperti *Mahasiswa Indonesia*, *Harian KAMI*, *Mimbar Demokrasi*, dan lain-lain, lahir. Selain itu, pemulihan kebebasan pers ini dibarengi dengan perbaikan kondisi ekonomi negara yang sebelumnya babak belur dengan bantuan penanaman modal asing dari berbagai negara, seperti Amerika Serikat yang menjadi 'sekutu' dari Orde Baru (Setia, 2023).

Perubahan rezim dari Orde Lama ke Orde Baru disambut oleh berbagai pihak yang berseberangan dengan rezim Demokrasi Terpimpin, terutama kaum Islamis. Menurut (Shokheh, 2008), sebelum tahun

1970-an, hubungan antara kaum Islamis dengan Orde Baru berjalan dengan cukup harmonis, bahkan dapat dianggap sebagai sebuah simbiosis mutualisme, sebelum pada akhirnya muncul berbagai peristiwa yang memperkeruh hubungan antara umat Islam dengan pemerintah Orde Baru dengan berbagai macam kebijakan yang dianggap tidak mengakomodir kepentingan umat Islam.

Rezim Orde Baru ingin merangkul berbagai golongan yang anti-komunis dan pihak-pihak yang menentang Soekarno di era Demokrasi Terpimpin, seperti kaum Islamis, nasionalis-sekuler, maupun para insan pers yang memiliki pers oposisi, baik dari kalangan mahasiswa maupun para jurnalis yang surat kabarnya dahulu ditutup oleh rezim Soekarno. Hal ini tentunya disebabkan oleh perasaan senasib sepenanggungan (kith and kin), bahwa mereka sama-sama dipersekusi oleh golongan komunis yang mendukung rezim Demokrasi Terpimpin, terutama antara NU dan PKI.

Peran Surat Kabar Oposisi sebagai Media Kritik Sosial di Masa Awal Orde Baru

Kritik sosial adalah salah satu bentuk komunikasi dalam masyarakat yang bertujuan sebagai kontrol terhadap sebuah sistem sosial atau proses bermasyarakat, dalam hal ini menggunakan media-media komunikasi massa seperti surat kabar. Bagi para insan pers, kritik sosial merupakan salah satu cara menjalankan fungsi pers pada umumnya, yaitu pers sebagai alat kontrol sosial. (Akbar, 1997) Namun, menurutnya, pers-pers yang kerap melontarkan kritik sosial ini, perlu menyalurkan kritikannya ala kadarnya sehingga tidak terjadi kerusuhan akibat berita yang diterbitkan dan mengandung unsur-unsur kritik sosial dibumbui dengan sentimen-sentimen tertentu.

Di masa awal Orde Baru, dengan adanya pemulihan kebebasan pers seperti sebelum tahun 1957, surat kabar oposisi menjadi senjata pamungkas untuk mengawal kebijakan pemerintah Orde Baru. Berdasarkan kepemilikannya, surat kabar oposisi dibagi menjadi tiga jenis, pertama yaitu pers oposisi yang dimiliki oleh partai politik tertentu yang beroposisi terhadap rezim Orde Lama di masa sebelum Orde Baru lahir, seperti Pedoman milik Partai Sosialis Indonesia, Abadi milik Masjumi, dan lain-lain. Kedua, yaitu pers oposisi independen, yaitu surat kabar yang tidak berafiliasi dengan partai politik oposisi, namun memiliki tendensi kontra-Orde Lama, seperti surat kabar Indonesia Raya yang dimiliki oleh Mochtar Lubis. Ketiga, yaitu pers yang dikelola oleh kesatuan aksi mahasiswa yang aktif mengkritisi dan mengoreksi kebijakan pemerintah Orde Baru, seperti *Mahasiswa Indonesia*, *Harian KAMI*, dan lain-lain.

Surat kabar oposisi pertama yang lahir setelah berakhirnya rezim Orde Lama, rata-rata adalah pers yang dimiliki oleh kesatuan aksi mahasiswa, seperti *Mahasiswa Indonesia*, *Mimbar Demokrasi*, dan *Harian KAMI*. Berdasarkan jumlah sirkulasinya, mingguan Mahasiswa Indonesia edisi Jawa Barat lebih tinggi oplahnya, sehingga menjadi sebuah pers oposisi mahasiswa yang terkenal pada masa itu. Apalagi, mayoritas redaktur Mahasiswa Indonesia edisi Jawa Barat merupakan anggota Ikatan Pers Mahasiswa Indonesia (IPMI). Adapun *Harian KAMI* dan *Mimbar Demokrasi* (didirikan oleh jebolan petinggi surat kabar mingguan *Mahasiswa Indonesia*), keduanya adalah surat kabar resmi yang diterbitkan oleh IPMI (Siregar, 1983).

Surat kabar mingguan *Mahasiswa Indonesia* edisi Jawa Barat yang berbasis di Bandung, misalnya, semenjak tahun-tahun awal Orde Baru, melontarkan serangan-serangan tajam kepada Soekarno dan rezim Demokrasi Terpimpin secara sporadis dan didukung oleh pihak militer. Surat kabar mingguan tersebut

secara kontinu mengeluarkan pendapat-pendapat yang menyerang Soekarno dan pemerintahannya, sekaligus menggambarkan Soekarno sebagai sosok yang harus bertanggung jawab atas rezim Demokrasi Terpimpin yang korup, sekaligus sosok yang menghalangi reformasi ekonomi di Indonesia di tengah carut-marutnya keadaan perekonomian di Indonesia saat itu (Raillon, Tamara, & Simanjuntak, 1985, hal. 47).

Surat kabar yang dibidani oleh Rachmat Tolleng ini berdiri pada tahun 1966 dan mulai menerbitkan edisi pertamanya pada tahun yang sama. Surat kabar ini menggunakan format tabloid dalam penerbitannya (30 x 45 cm) dan memiliki tebal sebesar 8 halaman, ditambah 2 halaman tambahan untuk iklan, sehingga total halaman yang dimiliki sebanyak 10 halaman. Surat kabar mingguan *Mahasiswa Indonesia* memiliki dua edisi berbeda berdasarkan daerah sirkulasinya, yaitu edisi Jawa Barat dan Jawa Tengah.

Pada awalnya, surat kabar *Mahasiswa Indonesia* fokus menyerang Soekarno secara sporadis melalui Badan Kerjasama Pers dan Kesatuan Aksi. Dalam edisi pertama surat kabar ini, misalnya, menuduh bahwa Soekarno harus bertanggung jawab atas kebobrokan rezim Orde Lama sekaligus mendukung adanya reformasi ekonomi setelah Indonesia diterpa hiperinflasi. Surat kabar ini juga turut serta dalam menggencarkan kampanye-kampanye antikorupsi, seperti isu mismanajemen dan penyelewengan di BULOG (Badan Urusan Logistik) yang dipimpin oleh seorang perwira tinggi ABRI itu. Isu-isu lainnya yang disorot oleh surat kabar mingguan tersebut, adalah penguasaan Kementerian Agama oleh tokoh Nahdlatul Ulama dan berbagai isu korupsi maupun dugaan pemborosan pada tahun 1970an, yang tentunya melahirkan Gerakan Anti Korupsi yang kemudian berkembang menjadi Komite Anti Korupsi. Gerakan ini juga kemudian menginspirasi aksi demonstrasi melawan wacana pembangunan Taman Mini Indonesia Indah yang digagas pada tahun 1971 (Raillon, Tamara, & Simanjuntak, 1985, hal. 47).

Hingga ditutup pada tanggal 21 Januari 1974, *Mahasiswa Indonesia* terkesan gahar mengkritisi kinerja pemerintah dengan mengangkat berbagai macam isu, mulai dari isu penyelewengan di Bulog, brutalitas aparat, masalah korupsi dan pemborosan di Pertamina yang dilakukan oleh Ibnu Sutowo, masalah penyelewengan yang terkait dengan ekspor-impor, hingga kritik terhadap pembangunan Miniatur Indonesia Indah, yang selanjutnya disebut dengan Taman Mini Indonesia Indah.



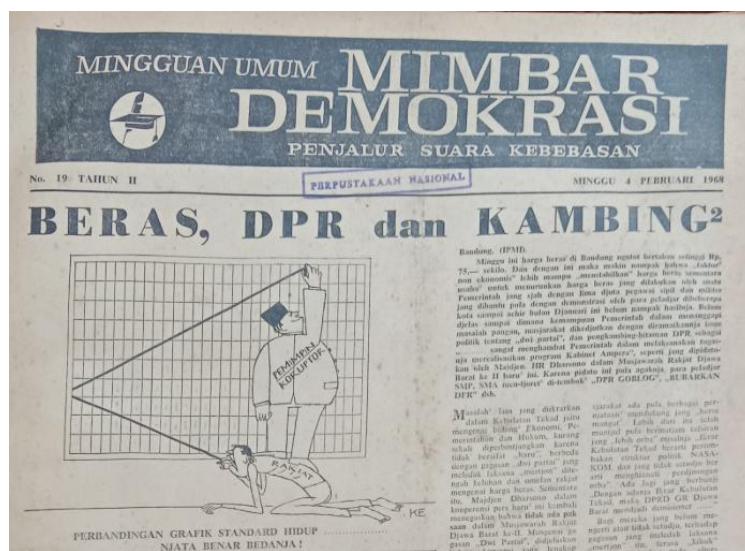
Gambar 1. Laporan jurnalistik dari *Mingguan Mahasiswa Indonesia* yang menyoroti kinerja Departemen Agama. Adanya laporan ini menguatkan bahwa *Mingguan Mahasiswa Indonesia* dianggap tidak mengakomodir kepentingan umat Islam oleh pengurusnya sendiri yang berhaluan Islamis.

(Sumber: *Mingguan Mahasiswa Indonesia*, Maret 1970, minggu ke-III)

Surat kabar *Mimbar Demokrasi* didirikan oleh para jebolan *Mingguan Mahasiswa Indonesia* pada tahun 1966 untuk mengakomodir golongan Islam yang sebelumnya tidak tersalurkan dalam *Mingguan Mahasiswa Indonesia*. Meskipun sama-sama bermarkas di Bandung dan juga menyampaikan kritik kepada pemerintah, *Mimbar Demokrasi* tidak setenar *Mingguan Mahasiswa Indonesia* Edisi Jawa Barat, apabila dihitung berdasarkan oplahnya. Secara konten, *Mimbar Demokrasi* lebih sedikit dalam membahas tentang isu politik dan pendidikan, dibandingkan dengan Harian KAMI maupun Mahasiswa Indonesia, jika dilihat dari persentase konten.

Surat kabar *Mimbar Demokrasi* juga memuat konten kritik kepada pemerintah Orde Baru, dimulai sejak awal berdirinya. Dalam edisi awalnya, antara tahun 1966-1967, *Mimbar Demokrasi* dominan membahas tentang peralihan rezim dari Soekarno ke Soeharto dan penyelesaian masalah Gestapu, sama halnya dengan surat kabar lain.

Surat kabar ini ikut serta mengkritisi pemerintah Orde Baru dengan berbagai isu, mulai dari isu penyelewengan, masalah pemerataan pendidikan, dan lain-lain. Dalam surat kabar *Mimbar Demokrasi* terbitan tanggal 4 Februari 1968 misalnya, surat kabar ini mengkritisi adanya dugaan manipulasi yang dilakukan oleh aparatur negara dengan karikatur dan laporan jurnalistik.



Gambar 2. Laporan jurnalistik *Mimbar Demokrasi* yang menyoroti ketimpangan standar hidup masyarakat dan manipulasi yang dilakukan oleh lembaga negara.

(Sumber: *Mimbar Demokrasi*, 4 Februari 1968)

Sejak berdiri pada tanggal 30 September 1966 dan terbit pertama kali pada tahun yang sama, *Mimbar Demokrasi* menghadapi berbagai macam masalah dalam hal finansial dan manajemen. Kendala yang bersifat teknis ini kemudian menyebabkan *Mimbar Demokrasi* harus tutup dua tahun kemudian, tepatnya pada tahun 1968 (perkiraan pada pertengahan atau akhir 1968, karena *Mimbar Demokrasi* masih terbit pada bulan Februari).

Surat kabar yang sejenis dengan *Mahasiswa Indonesia* dan *Mimbar Demokrasi* adalah *Harian KAMI*. Berbeda dengan kedua surat kabar tersebut, *Harian KAMI* adalah badan penerbitan resmi dari Kesatuan Aksi Mahasiswa Indonesia (KAMI) yang didirikan oleh kekuatan-kekuatan anti-komunis, seperti Subchan ZE dari pihak NU dan Harry Tjan Silalahi dari Partai Katolik. dan juga dikelola oleh pihak yang bernaung di

dalam KAMI. Badan penerbitan ini didirikan pada tanggal 17 Juni 1969 dan dikelola oleh Nono Anwar Makarim, seorang aktivis mahasiswa yang tergabung dalam Angkatan '66 (Crouch, 1980).

Harian KAMI menjadi tempat bernaung para wartawan senior maupun para akademisi, seperti Goenawan Mohamad yang kemudian mendirikan badan penerbitannya sendiri bernama *Tempo* pada tahun 1971. *Harian KAMI* juga sangat aktif mengkritisi kebijakan pemerintah dan juga fenomena sosial yang menyangkut kepentingan masyarakat banyak. Sebagai contoh, dalam terbitan tanggal 1 November 1969, *Harian KAMI* mengkritisi adanya tindakan premanisme yang mengganggu para pedagang kecil di kawasan Pasar Senen. Tindak premanisme ini, pada saat itu, tentunya sangat meresahkan rakyat. Akibatnya, pendapatan yang didapatkan harus berkurang setengahnya karena uang hasil penjualannya harus diserahkan kepada preman pasar.

Hingga pada tahun 1973, ketika hubungan pemerintah dan mahasiswa yang sebelumnya bersinergi membangun Orde Baru, mulai buruk yang ditandai dengan berbagai macam bentuk represifitas aparat, *Harian KAMI* masih tetap aktif menyuarakan kritisisme terhadap pemerintah, sekaligus memberitakan kebijakan-kebijakan pemerintah yang memiliki hubungannya dengan mahasiswa.

Di samping pers oposisi yang dikelola oleh mahasiswa ataupun kesatuan aksi mahasiswa, terdapat satu pers oposisi yang didirikan dan dikelola oleh seorang wartawan senior, yaitu harian *Indonesia Raya*. Sejak didirikan dan terbit pertama kali pada tahun 1949, surat kabar *Indonesia Raya* binaan Mochtar Lubis tetap mempertahankan status quo-nya, hingga ditutup pada tahun 1958.

Setelah jatuhnya rezim Demokrasi Terpimpin, *Indonesia Raya* kembali terbit pada tahun 1968, bersamaan dengan surat kabar lainnya yang menentang rezim Orde Lama. *Indonesia Raya* tetap mempertahankan status quo dengan mendukung dan mengkritik kebijakan pemerintah Orde Baru. Namun, dibandingkan dengan masa-masa sebelum 1959, *Indonesia Raya* sangat sulit menggaet pembaca lama yang terbiasa dengan gaya penulisan surat kabar ini yang mengkritisi pemerintah secara tajam (Hill, 2009).

Karena selalu mempertahankan *status quo* di tengah surat kabar lainnya yang berafiliasi pada organisasi maupun partai politik tertentu, *Indonesia Raya* jauh lebih bebas dalam mengkritisi kebijakan pemerintah. Meskipun, secara ideologis, *Indonesia Raya* cenderung anti terhadap komunisme, *Indonesia Raya* ikut mengkritisi pembantaian terduga PKI di kawasan Purwodadi, pada tahun 1969. Menurut surat kabar ini, perjuangan melawan komunisme harus dilakukan dengan meningkatkan standar hidup masyarakat, bukan melalui pembantaian-pembantaian. Setahun kemudian, *Indonesia Raya* memfokuskan pada isu penyelewengan yang dilakukan oleh Ibnu Sutowo sebagai petinggi Pertamina pada saat itu, di tengah masa jayanya, yang berujung pada krisis internal perusahaan minyak tersebut, antara tahun 1974 hingga 1975, setelah surat kabar tersebut dibredel (Qibtiyah dkk, 2023).



Gambar 3. Laporan jurnalistik *Indonesia Raya* yang menyoroti pemborosan yang dilakukan Ibnu Sutowo dengan mendirikan sebuah anak perusahaan baru yang tidak memiliki sangkut paut dengan pengelolaan migas, di tengah situasi ekonomi Indonesia yang sedang tidak baik-baik saja.

(Sumber: *Indonesia Raya*, 5 Januari 1970)

Pada bulan Februari 1972, *Indonesia Raya* menyoroti masalah penangkapan Arief Budiman hingga dibebaskan tanggal 15 Februari. Selain itu, dalam kurun waktu tersebut, *Indonesia Raya* juga mengkritisi adanya modal asing yang dianggap merugikan Indonesia pada saat itu, terutama dari negara-negara donor yang tergabung dalam IGGI (*Intergovernmental Group on Indonesia*). Isu-isu lainnya juga menjadi bahan kritikan oleh *Indonesia Raya*, seperti isu RUU Perkawinan hingga modal asing.

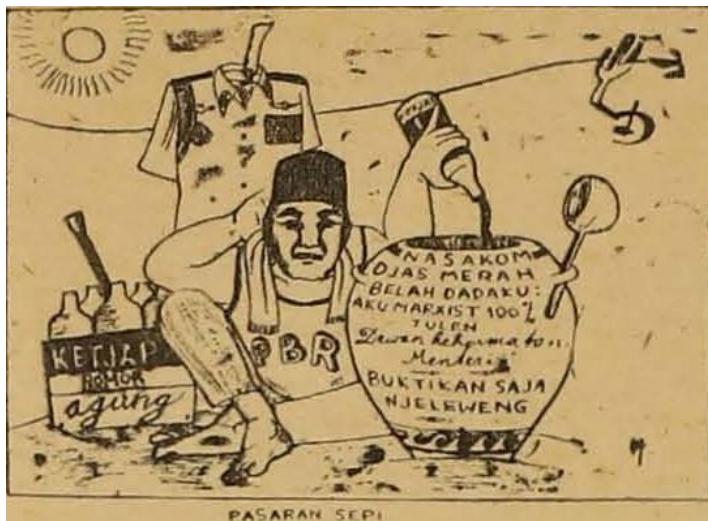
Berdarinya surat kabar oposisi ini yang menjadi sebuah antitesa dari surat kabar yang berpihak kepada pemerintahan tertentu tentunya beririsan dengan konsep Noam Chomsky terkait dengan politik dan kuasa media. Menurut Chomsky, sebuah media massa yang muncul mampu mempengaruhi opini masyarakat sekaligus menyebarkan persepsi baru di kalangan masyarakat luas. Dengan adanya surat kabar oposisi tersebut, masyarakat mulai menerima narasi-narasi anti-arus utama yang mengandung narasi kritis, sehingga memunculkan berbagai macam gerakan untuk menanggapi isu-isu krusial yang menjadi bahan kritikan yang dimuat dalam berbagai surat kabar oposisi, seperti gerakan-gerakan perlawan untuk menghentikan pembangunan Miniatur Indonesia Indah, gerakan menentang korupsi dan penyelewengan dari tubuh pemerintah pusat, hingga puncaknya yaitu peristiwa kerusuhan yang berawal dari penolakan-penolakan masyarakat dan para mahasiswa dengan adanya modal asing, yaitu Kerusuhan 15 Januari 1974 (Malari).

Bentuk Kritisisme dari Surat Kabar Oposisi di Masa Awal Orde Baru

Pada umumnya, berbagai surat kabar yang beredar di masa awal Orde Baru menggunakan tajuk wacana, laporan jurnalistik, dan karikatur untuk menyampaikan kritikan kepada pemerintah. Namun, karikatur seringkali menjadi objek utama untuk menggambarkan kritikan tersebut. Menurut (Waluyanto, 2000), karikatur dapat menjadi media dalam penyampaian kritik dengan menggunakan personifikasi-personifikasi tokoh-tokoh terkenal yang menyesuaikan isu-isu tertentu yang dikritisi, baik di Indonesia maupun di luar negeri. Penggunaan karikatur dalam penyampaian pesan lebih mudah diterima oleh masyarakat awam daripada pesan yang berbentuk teks.

Jika dilihat dari berbagai surat kabar oposisi yang beredar pada saat itu, baik *Indonesia Raya*, *Mimbar Demokrasi*, *Mahasiswa Indonesia*, dan *Harian KAMI* menggunakan karikatur di halaman tertentu yang

berhubungan dengan isu-isu yang diberitakan dan dikritisi. Sebagai contoh, dalam mingguan *Mahasiswa Indonesia* terbitan 16 Oktober 1966, terdapat sebuah karikatur yang menyindir Soekarno, yang pada saat itu sudah tidak lagi memiliki kekuasaan, digambarkan seolah-olah dirinya menjadi seorang penjual keliling yang barangnya tidak laku terjual. Karikatur ini memiliki makna bahwa Soekarno sudah hilang pengaruhnya dan tidak bisa ‘menjual’ konsepsi politiknya seperti Nasakom, Jas Merah, dan lain-lain. Karikatur ini terbit seiring dengan naiknya Soeharto ke kursi kekuasaan secara *de facto*.



Gambar 4. Karikatur dalam mingguan *Mahasiswa Indonesia* yang menyindir Soekarno yang pada saat itu sudah tidak memiliki kekuasaan lagi, dengan digambarkan sebagai seorang penjual keliling dengan keterangan *Pasaran Sepi* yang artinya Soekarno sudah tidak mampu ‘menjual’ konsepsi politiknya sendiri.
(Sumber: *Mahasiswa Indonesia*, 16 Oktober 1966)

Surat kabar lainnya seperti *Indonesia Raya* dan *Mimbar Demokrasi* juga menggunakan karikatur dalam menyampaikan kritik kepada pemerintah melalui pesan-pesan yang mampu dicerna oleh masyarakat awam. Apalagi, *Indonesia Raya* sendiri dikenal sebagai surat kabar oposisi yang muncul di masa awal Orde Baru yang mempertahankan *status quo* kepada pemerintah. Seperti dalam *Indonesia Raya* terbitan pada tanggal 30 Oktober 1968 ini, yang di mana, ada sebuah karikatur yang menyindir budaya korupsi, yang tergambar dengan segerombolan koruptor yang jumlahnya banyak, menertawakan orang jujur yang jumlahnya hanya sedikit.

Dibandingkan dengan surat kabar tersebut, *Harian KAMI* terkenal sangat irit dalam menerbitkan karikatur. Dalam berbagai edisi, hingga tahun 1973, lebih fokus dalam menyalurkan kritik kepada pemerintah melalui *straight news* maupun tajuk wacana yang ditulis oleh para akademisi yang bernaung dalam surat kabar tersebut. Terkadang, *Harian KAMI* juga menggunakan rubrik *Kerikil Tadjam* untuk menyuarakan kritiknya kepada pemerintah ataupun perusahaan yang disorot.

Penggunaan rubrik semacam ini juga dapat ditemui di *Mahasiswa Indonesia* dan *Indonesia Raya*, namun tidak ditemukan dalam *Mimbar Demokrasi*. Di surat kabar *Mahasiswa Indonesia*, rubrik kritikan muncul di segmen *Hati Nurani Rakjat* dan *Tjorat-tjoret*. Dengan memaparkan intisari dari isu-isu yang diberitakan dan menjadi bahan kritikan dengan nada satir, mingguan *Mahasiswa Indonesia* mampu menyalurkan aspirasi mereka melalui rubrik tersebut.



Gambar 5. Rubrik *Hati Nurani Rakjat* yang menyindir Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara (Menpan) saat itu, yaitu Harsono, yang sesumbar bahwa pertumbuhan administrasi pemerintahan akan menjurus pada situasi yang tak memungkinkan untuk menyelenggarakan administrasi yang efisien, tanpa bukti tindak lanjut yang jelas (hanya sebatas sinyalemen/pertanda).

(Sumber: *Mahasiswa Indonesia*, Juli 1969, minggu kedua)

Harian *Indonesia Raya* juga memiliki rubrik serupa yang digunakan untuk menyampaikan kritiknya kepada pemerintah. Dengan menggunakan nama *Di Pinggir Jalan*, rubrik ini menyajikan intisari dari sebuah isu yang menjadi perhatian besar pada saat itu, melalui bahasa setengah satir.



Gambar 6. Rubrik *Di Pinggir Jalan* yang menjadi ciri khas *Indonesia Raya* dalam menyampaikan kritik maupun intisari berita melalui bahasa satir dan pertanyaan retoris. Dalam terbitan tanggal 1 November 1968, rubrik ini seolah-olah menegaskan janji pemberantasan korupsi yang seringkali digembar-gemborkan Presiden Soeharto.

(sumber: *Indonesia Raya*, 1 November 1968)

Hadirnya karikatur maupun tajuk wacana ini menjadi sebuah kekhasan sendiri bagi para insan pers untuk menyuarakan kritik kepada kebijakan pemerintah dengan pesan yang dimengerti oleh masyarakat luas, dengan berbagai personifikasi maupun metafora tertentu yang melambangkan isu-isu yang dikritisi dengan golongan tertentu yang terkait dengan isu tersebut.

Respon Pemerintah Orde Baru: Dari Toleransi hingga Pembredelan

Pada awalnya, pemerintah Orde Baru tidak menanggapi dengan serius adanya kritikan-kritikan tajam yang dilontarkan kepada rezim dalam berbagai permasalahan. Sebagaimana kata Ali Murtopo dalam menanggapi kebebasan pers, yaitu ‘Kebebasan pers adalah mahkota bagi Orde Baru’, pemerintah tidak mau menindak para badan pers secara berlebihan, meskipun kritik-kritik yang ditujukan kepada pemerintah Orde Baru disampaikan dengan tajam dengan berbagai sindiran dalam bentuk-bentuk yang beragam, mulai dari laporan jurnalistik hingga karikatur. Namun, ada juga indikasi-indikasi yang mengarah kepada intervensi pemerintah Orde Baru untuk mengaburkan fakta-fakta terkait dengan pembantaian yang dilakukan oleh aparat militer di Purwodadi, Jawa Tengah yang terjadi pada tahun 1968. Sebagai contoh, pada bulan Maret 1969, yang di mana, para wartawan *Indonesia Raya* yang dikirim oleh Mochtar Lubis ke Purwodadi, diikuti oleh aparat pemerintah dan tidak berhasil mengungkap fakta dari pembantaian tersebut. Surat kabar ini hanya mendapatkan keterangan dari Panglima Divisi Diponegoro yang turut serta dalam pembantaian ini, yang tentu menyangkal adanya pembantaian yang terjadi di Purwodadi ini, yang menargetkan orang-orang yang dituduh terlibat PKI.

Pada bulan Januari 1970, menanggapi laporan-laporan dari surat kabar yang mayoritas menyoroti isu-isu korupsi dan penyelewengan dalam berbagai lembaga negara maupun BUMN pada saat itu, seperti Bulog, dan dipertegas dengan adanya gerakan-gerakan mahasiswa untuk menuntut Soeharto berkomitmen untuk memberantas korupsi, Presiden Soeharto membentuk Komisi Empat untuk menyelidiki dan menuntaskan perkara yang berhubungan dengan tindak pidana korupsi. Komisi Empat sendiri terdiri atas Wilopo yang menjadi ketua dari komisi ini, diikuti oleh Mohammad Hatta dan beberapa tokoh bangsa lainnya termasuk IJ Kasimo, Anwar Tjokroaminoto, dan WZ. Johannes.

Pembentukan Komisi Empat, sebagai salah satu langkah dari pemerintah Orde Baru untuk mengintensifkan pemberantasan korupsi, ternyata disetujui oleh mahasiswa. Namun, pada kenyataannya, mempertanyakan kinerja komisi tersebut. Mahasiswa yang tergabung dalam Komite Anti Korupsi (KAK) menyahut, ‘Tanpa Komisi Empat dan tanpa menunggu lima bulan, kami pun sudah tahu itu (soal korupsi yang ada)’. Namun, respon serupa yang dilontarkan oleh Mohammad Hatta, bahwa korupsi sudah mengakar dan membudaya di Indonesia, justru diberikan sambutan oleh mahasiswa (Hasibuan dkk, 2011).

Memasuki tahun 1971, beberapa surat kabar, termasuk *Indonesia Raya* dan *Harian KAMI* diikuti oleh para mahasiswa melakukan protes atas pembangunan miniatur Indonesia Indah, yang selanjutnya disebut dengan Taman Mini Indonesia Indah (TMII). Gerakan tersebut dinamai sebagai ‘Gerakan Anti Mini’, yang ditujukan untuk menggagalkan pembangunan sebuah taman miniatur yang digagas oleh Tien Soeharto. Akan tetapi, kritisisme dari berbagai pihak, khususnya sebagian pers yang menyindir dan mengkritisi pembangunan miniatur Indonesia Indah, dianggap sebagai angin lalu, bahkan disikapi dengan represifitas aparat. Pada tanggal 7 Januari 1972, Kopkamtib mengeluarkan larangan terhadap seluruh aksi mahasiswa di jalan. Hal ini tentu menjadi sebuah pembuka dari tindakan represif yang dilakukan pemerintah Orde Baru, meskipun belum sampai muncul ancaman pembredelan (Fatah, 2010).

Dalam menanggapi isu RUU Perkawinan yang menjadi bahan protes dalam berbagai macam surat kabar, sekaligus menjadi bahan perdebatan antara kelompok Islam dan kaum nasionalis-sekuler di DPR, diterima

di seluruh fraksi pada tahun 1974, setelah melalui pembahasan hingga protes dari berbagai kelompok Islam, seperti *Nahdlatul Ulama* (Rifai, 2015).

Pada tanggal 21 Januari 1974, beberapa hari setelah kerusuhan Malari pada tanggal 15 Januari 1974, surat kabar oposisi yang dianggap mengancam stabilitas nasional, dicabut surat izin terbit dan cetaknya oleh Departemen Penerangan bersama dengan Kopkamtib. Dengan demikian, arah perkembangan pers nasional kembali pada arah perkembangan pers otoriter, seperti ketika era Demokrasi Terpimpin.

Kesimpulan

Munculnya surat kabar oposisi yang beredar di masa konsolidasi Orde Baru (tepatnya antara tahun 1966 hingga 1974) membuktikan bahwa sebelum memasuki era represivitas terhadap para insan pers antara tahun 1974 hingga 1998, pemerintahan Orde Baru sangat gencar dalam mengkampanyekan kebebasan pers yang selama ini dikekang oleh rezim Orde Lama. Hal ini dibuktikan dengan adanya badan-badan pers oposisi yang baru dari kalangan mahasiswa, seperti *Mahasiswa Indonesia*, *Harian KAMI*, dan *Mimbar Demokrasi*. Selain itu, ada juga pers oposisi independen yang berdiri pada saat itu, yaitu *Indonesia Raya*, diizinkan kembali untuk terbit.

Seiring dengan pemulihian kebebasan pers tersebut, banyak pers oposisi melontarkan kritik kepada pemerintah maupun institusi melalui berbagai bentuk, seperti karikatur, tajuk wacana, laporan jurnalistik, ataupun rubrik yang mengandung bahasa *satire* sehingga dapat dimengerti oleh masyarakat luas terkait dengan isu-isu yang sedang hangat.

Namun, kebebasan pers di era Orde Baru tidak berlangsung lama. Karena pemerintah Orde Baru menganggap surat kabar oposisi yang kerap melontarkan kritik dianggap mengancam stabilitas nasional dan menyebabkan kerusuhan, setelah kerusuhan 15 Januari 1974, beberapa surat kabar yang dianggap menyebabkan kerusuhan dan keonaran oleh rezim Orde Baru, tepatnya pers-pers oposisi yang melontarkan kritik tersebut, dibredel dengan dicabut surat izin dan cetaknya.

Adanya pers oposisi antara tahun 1966 hingga 1974 hingga bentuk-bentuk kritik yang digunakan dalam surat kabar tersebut membuktikan bahwa pada zaman tersebut, kebebasan pers dan demokratisasi pernah menjadi sebuah *legacy* dari pemerintahan Orde Baru untuk menyuarakan kebenaran dan keadilan berdasarkan kaidah jurnalistik. Apalagi, jauh sebelum adanya media *online* dan media sosial, surat kabar merupakan media komunikasi massa paling populer pada masanya, yang mampu mengubah persepsi masyarakat melalui simbol, teks, maupun makna yang terkandung dalam konten-konten yang disajikan.

Daftar Pustaka

- Akbar, A. Z. (1997). Kritik Sosial, Pers dan Politik Indonesia. *Unisia*, 44-51.
- Chomsky, N. (2022). *Politik Kuasa Media*. Yogyakarta: Jalan Baru.
- Crouch, H. A. (2007). *The Army and Politics in Indonesia*. Equinox Publishing.
- Fatah, E. S. (2010). *Konflik, Manipulasi, dan Kebangkrutan Orde Baru: Manajemen Konflik Malari, Petisi 50, dan Tanjung Priok*. Jakarta: Burung Merak Press.
- Gottschalk, L. (1986). *Mengerti Sejarah*. Jakarta: UI Press.

- Harian KAMI. (1973). *Kebebasan Ilmiah dan Kebebasan Mimbar di Indonesia*. Jakarta: Kesatuan Aksi Mahasiswa Indonesia.
- Hasibuan dkk. (2011). *Hariman dan Malari: Gelombang Aksi Mahasiswa Menentang Modal Asing*. Jakarta: Gramedia.
- Hill, D. T. (2011). *Pers di Masa Orde Baru*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Hill, D. T. (2011). *Jurnalisme dan Politik di Indonesia: Biografi Kritis Mochtar Lubis (1922-2004) sebagai Pemimpin Redaksi dan Pengarang*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Indonesia Raya. (1968). *Karikatur*. Indonesia Raya
- Indonesia Raya. (1968). *Di Pinggir Djalan*. Indonesia Raya
- Indonesia Raya. (1972). *Arief Budiman Bebas*. Indonesia Raya
- Indonesia Raya. (1973). *Islam dan RUU Perkawinan (tajuk wacana)*. Indonesia Raya
- Kuntowijoyo. (2005). *Pengantar Ilmu Sejarah*. Bentang Pustaka.
- Mahasiswa Indonesia. (1966). *Karikatur 'Pasaran Sepi'*. Badan Kerjasama Pers dan Kesatuan Aksi.
- Mahasiswa Indonesia. (1969). *Hati Nurani Rakjat*. Badan Kerjasama Pers dan Kesatuan Aksi.
- Mahasiswa Indonesia. (1970). *Departemen Agama dalam Sorotan: Djika tak mampu direorganisir lebih baik dibubarkan sadja*. Badan Kerjasama Pers dan Kesatuan Aksi.
- Mimbar Demokrasi. (1968). *Beras, DPR, dan Kambing-kambing*. IPMI.
- Nasution, A. H. (1967). *Penegakan, Pembinaan, dan Pengisian Orde Baru*. Jakarta: Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara.
- Nuryanti, R. (2008). *Tragedi Sukarno: Dari Kudeta sampai Kematiannya*. Yogyakarta: Penerbit Ombak.
- Qibtiyah, A. G. M., dkk. (2023). Kinerja Perusahaan Pertambangan Minyak dan Gas Bumi Negara (Pertamina) di Bawah Kepemimpinan Ibnu Sutowo Tahun 1968-1976. *Journal of Indonesian History*. 11(1). 76-84.
- Raillon, F., Tamara, N., & Simanjuntak, E. S. (1985). *Politik dan Ideologi Mahasiswa Indonesia: Pembentukan dan Konsolidasi Orde Baru 1966-1974*. Jakarta: LP3ES.
- Ricklefs, M. C. (2008). *Sejarah Indonesia Modern 1200–2008*. Jakarta: Penerbit Serambi.
- Rifai, A., dkk. (2015). Sejarah Undang-Undang Perkawinan Atas Pendapat Hingga Pertentangan dari Masyarakat dan Dewan Perwakilan Rakyat Tahun 1973-1974. *Journal of Indonesian History*. 4(1). 1-9.
- Samsudin. (2004). *Mengapa G30S/PKI gagal: Suatu analisis*. Yayasan Obor Indonesia.
- Setia, N. (2023). Keterlibatan Amerika Serikat dalam Upaya Pembangunan Ekonomi Indonesia Era Soeharto 1966-1980. *Journal of Indonesian History*. 11(1). 44-54.
- Shokheh, M. (2008). *Dari Konfrontasi menuju Akomodasi: Relasi Islam-Negara di Indonesia masa Orde Baru 1966-1998*. Semarang: Unnes Press.
- Siregar, A. E. (1983). *Pers Mahasiswa Indonesia: Patah Tumbuh Hilang Berganti*. Jakarta: PT. Karya Unipress.
- Sjamsuddin, H. (2007). *Metodologi Sejarah*. Yogyakarta: Penerbit Ombak.
- Soe, H. G. (1989). *Catatan Seorang Demonstran*. Jakarta: LP3ES.
- Steele, J. E. (2005). *Wars within: The story of Tempo, an independent magazine in Soeharto's Indonesia*. Equinox Publishing.
- Surjomihardjo, A. (2002). *Beberapa Segi Perkembangan Sejarah Pers di Indonesia*. Jakarta: Kompas.

- Suwirta, A. (2018). Pers dan Kritik Sosial pada masa Orde Baru: Studi Kasus Pers Mingguan *Mahasiswa Indonesia* di Bandung, 1966-1974. *Mimbar Pendidikan*, 3(2), 113-136
- Suwirta, A. (2018). Pers dan Kritik Sosial pada Masa Orde Baru: Peristiwa MALARI Tahun 1974 dalam Pandangan Surat Kabar *Merdeka* dan *Indonesia Raya* di Jakarta. *SUSURGALUR*, 6(1). 73-98.
- Syukur, A., dkk. (2012). *Indonesia dalam arus sejarah: Orde baru dan reformasi*. Jakarta: Ichtiar Baru van Hoeve
- Waluyanto, H. D. (2000). Karikatur sebagai Karya Komunikasi Visual dalam Penyampaian Kritik Sosial. *Nirmana*, 2(2).